



Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara

Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) seperti observasi, wawancara dan *Library research* (Penelitian Kepustakaan). Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisor. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Potensi Wisata Alam dan Budaya, Tapanuli Utara

Abstract

The purpose of this research is to know the role of local government in developing the tourism potential of nature and cultural tours in North Tapanuli Regency. In this study the method used is descriptive qualitative approach is exemplary. The source of the data in this study there are two primary data and secondary data. The technique of data collection is done Field Research (Fieldwork) such as observation, interviews and Library research (Research Libraries). The analysis will be used by the author is descriptive qualitative. The results of research on the role the role of tourism in the development of the potential of tourism in North Tapanuli Regency is dominant as a facilitator as compared with other roles as motivators and dinamisor. The role of the facilitator is seen primarily in terms of the provision of the infrastructure objects are still largely borne by the Fund's channelling aid, a stimulant for people who want to develop a tourism objects, tourism promotion efforts, as well as facilities provided on such third-party investors and entrepreneurs to develop business tourism sights in North Tapanuli Regency.

Key words: *The Role Of Government, Potential For Nature; Cultural Tourism, Tapanuli Utara*

How to Cite: Simamora, R.K.; dan Rudi S.S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (1): 79-96.

*Corresponding author:

E-mail: rudisalamsinagauma@gmail.com

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan management yang baik agar mampu menciptakan sector pariwisata yang diminati wisatawan local maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara.

Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan Nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata (Widodo, 2013).

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah

untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kabupaten yang berada di wilayah administratif Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata.

Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten di Daerah Sumatera Utara. Sebagai sebuah Kabupaten, Tapanuli Utara memiliki wewenang sendiri untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, termasuk di dalamnya adalah potensi sumberdaya sektor Pariwisata. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan serta dipasarkan yaitu mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata rohani.

Berbagai potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, sudah sepantasnya daerah ini menjadi destinasi wisata yang baru dan unggul di Indonesia. Seluruh objek wisata di atas masih dalam kendali pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Artinya, pengelolaan dan pengembangan obyek wisata masih mengandalkan insentif dari pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta serta

masyarakat. Beragamnya jenis obyek wisata di Tapanuli Utara dapat menjadi potensi dan investasi ekonomi yang besar di masa yang akan datang, baik itu bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar, namun tentu saja dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta kesinambungan diantara *stakeholder* terkait.

Namun objek wisata tersebut dapat dikatakan belum dikembangkan secara optimal baik oleh masyarakat sekitar objek pariwisata, pengelola serta pemerinatah setempat. Sarana dan prsarana yang dapat mendukung objek wisata di Tapanuli Utara masih kurang seperti transportasi dari pusat kota menuju objek wisata, tempat penginapan untuk wisatawan dan sarana informasi. Hal tersebut dapat diaktakanb masih minimnya fasilitas yang ada di objek wisata tapanuli utara, padahal dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan pendapatan operasional pada objek wisata Tapanuli Utara. Pengembangan objek wisata tersebut, ada beberapa hmbatan seperti dana untuk pengembangan wisata, hal ini terlihat dari belum diperbaikinya kondisi jalan ada yang rusak, belum dibangunya taman-taman bermain disekitar objek wisat serta fasilitas-fasilita umum lainnya.

Perlunya upaya pengembangan objek wisata di Tapanuli Utara, agar dapat bermanfaat lebih optimal, dapat memberikan pendapatan tamabhan bagi masyarakat setempat yang berusaha disektor wisata tersebut. Objek wisata di Tapanuli Utara masih banyak sarana dan prasana yang masih kurang sehingga dapat dikatakan prasarana dan sarana pariwisata belum memadai.

Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua

peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, social dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara.

Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan infrakstruktur, management dan keamanan yang baik dalam proses pengembangan pariwisata guna terciptanya suatu objek pariwisata yang mempunyai daya tarik dan daya jual baik di dalam negeri dan luar negeri

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Kurt dan Miller dalam Moleong (2004: 3) “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya”. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk pemahaman tentang realita social sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena social secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Nazir (2003:16) “penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah didalam masyarakat, serta tata cara yang

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

Penggunaan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini dengan alasan untuk menggali dan mengungkapkan fenomena social dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan Peran serta Pemerintah Daerah khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Jl. Balige

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pertanyaan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan. Dengan ini ditetapkan informan penelitian ini adalah: Kepala Dinas Pariwisata; Kabag Pengembangan Pariwisata; LSM Pariwisata/Unsur Akademisi; Masyarakat Sekitar.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yakni data yang berupa hasil wawancara dengan informan selain itu data yang diperoleh dari lapangan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta dari Objek Wisata tersebut). Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah, yakni data literature yang mendukung data primer seperti buku catatan atau dokumentasi dari instansi berupa absensi, laporan keuangan dan lain-lain.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang akan di lakukan dalam proses

pengumpulan data adalah: *Field Research* (Penelitian Lapangan), Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam mencari data dan informasi dimana penelitian dilakukan secara langsung terjun kelapangan dengan melakukan cara sebagai berikut: Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kantor Dinas Pariwisata serta Objek Wisata di Kabupaten Tapanuli Utara; Wawancara (Interview) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat daerah yang berwenang dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan terutama kepala Dinas Pariwisata & Dinas Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara serta Pengelola Objek Wisata tersebut.

Library research (Penelitian Kepustakaan) dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penulusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.

Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi data, tabulasi data, dan interpretasi data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah yang cukup terkenal di Kawasan Nusantara, terutama karena potensi alam dan sumber daya manusianya. Kabupaten Tapanuli Utara juga salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara terletak diwilayah dataran tinggi Sumatera Utara berada pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau

berbatasan langsung dengan lima Kabupaten yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumban Batu Utara; Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang dapat digali serta dilestarikan dan dijadikan sebagai aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut sangat berhubungan dengan daya tarik dan nilai obyek wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan yang terdiri atas obyek wisata rohani, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya serta obyek wisata hutan atau agrowisata.

Obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah obyek wisata alam atau rekreasi panorama Danau Toba seluas 660 ha yang berpeluang cukup besar menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Obyek wisata alam yang terdapat di sekitar Danau Toba dalah panorama indah Hutaginjang, pantai Muara dan Pulau Sibandang. Lokasi panorama Hutaginjang terletak sekitar 38 km dari kota Tarutung atau 11 km dari Bandara Silangit ke arah Kecamatan Muara. Selain itu juga, terdapat pemandangan indah Danau Toba yang terletak di Kecamatan Muara, dimana terdapat pantai yang cukup landai yang telah dikembangkan sebagai wisata pantai dan telah dilengkapi dengan dibangunnya prasarana jalan hotmix dan sarana pariwisata pendukung. Selain pantai, juga terdapat sebuah pulau di Kecamatan Muara sebagai pulau terbesar kedua di Danau Toba, yaitu Pulau Sibandang, atau masyarakat menyebutnya Pulau Mangga.

Beberapa tujuan wisata di Kabupaten Tapanuli Utara Antara lain:

Tabel 1.1. Nama Objek Wisata dan Jenis Wisatawan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
1	Panarama	Wisata	Muara

	Alam Hutaginjang	Alam	
2	Panatai Muara	Wisata Alam	Muara
3	Air Soda	Wisata Alam	Tarutung
4	Air Panas Hutabarat	Wisata Alam	Tarutung
5	Air Panas Saitnihuta	Wisata Alam	Tarutung
6	Air Hangat Hukan	Wisata Alam	Tarutung
7	Air Panas Sipaholon	Wisata Alam	Sipaholon
8	Pacuan Kuda Siborong-Borong	Wisata Alam	Siborongborong
9	Sapo Partungkoan	Wisata Alam	Tarutung
10	Gua Natumandi	Wisata Budaya	Tarutung
11	Situs Hindu Hopang	Wisata Budaya	Simangumban
12	Salib kasih Siatas Barita	Wisata Budaya	Sitas Barita
13	Makam Munson dan Lyman	Wisata Rohani	Lobu Pining
14	Kantor Pusat HKBP	Wisata Rohani	Pea Raja Tarutung
15	Seminarium	Wisata Rohani	Sipaholon
16	Tugu Nomensen	Wisata Rohani	Saitnihuta
17	Onan Sitahuru	Wisata Rohani	Saitnihuta
18	Gereja Dame	Wisata Rohani	Saitnihuta
19	Makam Pendeta Johannes	Wisata Rohani	Pansur Napitu
20	Makam Pendeta Johannes Siregar	Wisata Rohani	Muara

Sumber : BPS Tapanuli Utara Dalam Angka 2015

Potensi wisata sejarah lainnya masih cukup banyak dan masih perlu didukung oleh kajian yang cermat dan sistematis. Potensi sejarah yang berimplikasi pada keberadaan tapak-tapak sejarah yang masih perlu dikaji antara lain Tapanuli Utara dalam konteks Perang Paderi,

Tapanuli Utara dalam konteks Perang Batak, dalam Tapanuli Utara dalam konteks Perang Batak, Tapanuli Utara dalam konteks Sejarah Perjuangan Bangsa, Tapanuli Utara dalam konteks perjalanan misi Lyman-Munson, Tapanuli Utara dalam konteks Sejarah Pendidikan, Kajian Situs Unte Mungkur Kecamatan Muara dan sebagainya.

Untuk mengembangkan berbagai potensi daerah termasuk potensi wisata perlu didukung oleh sektor penunjang, yaitu sarana dan prasarana. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat seperti sarana transportasi, dan irigasi senantiasa dihadapkan pada kendala keterbatasan kemampuan pendanaan. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas publik yang strategis yang meliputi: Sarana dan Prasarana Transportasi

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk membangun jalan dan jembatan yang bersifat baru untuk mendukung kawasan terisolir, sentra produksi dan jalan-jalan strategis, peningkatan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada dari kondisi jalan tanah menjadi sirtu, telpord, lapen dan hotmix sedangkan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksudkan adalah untuk menjaga kondisi jalan agar tetap mantap dan terpelihara.

Program Penanganan Jalan dan Jembatan dilaksanakan mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Tapanuli Utara dan selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan pembangunan daerah, sehingga sasaran yang mendasar dalam menuntaskan permasalahan prasarana jalan dan jembatan adalah: Memperhatikan akses menuju kawasan terisolir; Memperhatikan akses menuju kawasan-kawasan strategis;

Memperhatikan jalan menuju sentra-sentra produksi; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi antar wilayah; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi ke potensi obyek-obyek wisata

Untuk tercapainya sasaran infrastruktur jalan dan jembatan maka dilakukan beberapa kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di beberapa bagian wilayah. Dari data tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa capaian hasil yang telah dilaksanakan berupa jalan hotmix dengan peningkatan tipe dari kondisi jalan sirtu/teleport ataupun aspal biasa dan pembangunan jembatan di beberapa tempat serta jembatan gantung juga di beberapa tempat.

Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2014 mencapai 1.360,02 km. pada tahun 2014 kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Tapanuli Utara 80,16% kondisinya baik, 5,90% kondisinya sedang, dan 13,94% kondisinya rusak, rusak berat, dan tidak terperinci.

Pembangunan sarana/prasarana wisata mencakup hotel, akomodasi, obyek wisata maupun prasarana pendukungnya. Pada tahun 2014 jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli tercatat 21 unit dengan 542 kamar dan 827 tempat tidur.

Sarana prasarana lain pendukung pengembangan pariwisata adalah Bandara Udara Silangit dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan peningkatan pemasaran komoditas pertanian. Bandara Silangit (Kecamatan Siborongborong) memiliki luas 85,10 ha dengan landasan pacu (*runway*) 1.850 x 30 m yang dapat didarati oleh pesawat kecil tipe CN 235 dan akan dikembangkan dengan panjang landasan pacu 2.400 x 50 m sehingga mampu didarati jenis F-28/Boeing 737-200. Bandara Silangit adalah satu-satunya bandara kelas IV yang memiliki fasilitas dan kemampuan setara dengan bandara kelas II di Indonesia. Pada 14 Desember 2012, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara resmi

menyerahkan operasional pengelolaan Bandara Silangit kepada PT Angkasa Pura II (Persero). Dengan demikian, status bandara ini secara otomatis berubah dari bandara UPT menjadi bandara komersial.

Saat ini penerbangan Silangit dilayani operator Wings Air untuk Rute Batam-Silangit, dan Susi Air untuk Rute Medan-Silangit dan Gunung Sitoli-Silangit. Program penerbangan langsung Jakarta – Silangit terus diupayakan dengan optimal melalui pembenahan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan.

Sementara itu, ferry penyeberangan Nainggolan (Sippingan) Kabupaten Samosir-Muara Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dan secara rutin dijadwalkan pada hari Senin, Jumat dan Minggu. Jadwal/hari penyeberangan disesuaikan dengan jadwal rute penerbangan pesawat dari Silangit-Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

Dinas Pariwisata Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), dan Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural eselon III A dan 4 (empat) orang Eselon IIIB serta 12 (dua belas) orang pejabat struktural eselon IV.

Susunan struktur Dinas Pariwisata Tapanuli Utara terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretariat, terdiri dari: Sub Bagian Umum; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Program; Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari; Seksi

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; Seksi Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata; Bidang Industri Jasa Usaha Pariwisata terdiri dari; Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata; Seksi Usaha Penyelenggaraan Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum; Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari: Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Kerajinan dan Seni Rupa serta Pertunjukan; Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Suara, Seni Musik dan Seni Tari.

Bidang Sarana Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif terdiri dari: Seksi Promosi dan Informasi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Seksi Penyuluhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional; Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, menetapkan bahwa Dinas Pariwisata, Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok sebagai berikut : menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian bidang Pariwisata seni dan budaya. Serta berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No.54 Tahun 2008 tentang uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Kabupaten Tapanuli Utara.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ke depan secara mendasar mengacu pada beberapa konsep, seperti: Konsep Pembangunan Berkelanjutan; Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu; Konsep Pengembangan Produk; Konsep Pengembangan Pemasaran Dan Investasi; Konsep Pengembangan Kelembagaan; Konsep Pengembangan Lingkungan.

Konsep Pengembangan Berkelanjutan, dengan kondisi potensi wisata berbasis alam (pegunungan, hutan, sungai, keunikan geologis dan danau) dan budaya yang mulai terancam kelestariannya, pembangunan keparawisataan Kabupaten Tapanuli Utara sudah saatnya berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pendekatan wilayah yang bertujuan sedemikian perlu dibarengi untuk mengembangkan keterpaduan antar sektor yang diharapkan dapat berfungsi dan bersinergi dalam pengembangan daerah.

Pendekatan yang dilakukan tersebut mengacu kepada rumusan pengertian pariwisata. Dalam buku "Agenda 21 sektoral : " pariwisata untuk mengembangkan kualitas hidup secara berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai tema sentral dan juga menumbuhkembangkan kesejahteraan dan perdamaian".

Sesuai dengan batasan tersebut maka pariwisata abad 21 dirumuskan ke dalam 2 (dua) misi pokok yaitu peningkatan keunggulan kompetitif dan peningkatan kontribusi pariwisata bagi pengembangan daerah serta kesejahteraan bersama.

Dengan komitmen tersebut, pariwisata Tapanuli Utara diharapkan dapat menjadi penggerak sektor ekonomi strategi dan pada saat yang bersamaan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah. Nuansa agenda pengembangan dan pembangunan berdaya pariwisata lebih berorientasi kepada pengembangan produk dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar mancanegara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumberdaya pariwisata yang ada.

Kegiatan pariwisata pada dasarnya adalah kegiatan manusia yang dalam mobilitasnya didorong oleh keinginan tahu dan menikmati objek wisata dan

atraksi wisata tanpa mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu konsep pengembangan wilayah terpadu dapat mengatasi dan membantu perbedaan administratif antar wilayah kabupaten menjadi kesatuan perencanaan dan pengembangan wilayah dengan kegiatan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam konteks pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara, sangat penting untuk dapat dilakukan integrasi dan sinergi antar Kabupaten Tapanuli Utara dengan daerah lain terutama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Salah satu alasan dari sisi spasial adalah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian dari Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Toba sekitarnya. Apalagi berdasarkan Ripparnas 2010-2025 kabupaten-kabupaten tersebut berada dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang sama yaitu KPPN Toba dan sekitarnya, mengingat kedekatannya secara geografis maka Kabupaten Tapanuli Utara juga perlu menjalin sinergitas dengan kabupaten/kota yang termasuk dalam lingkungan KPPN Sibolga. Bahkan secara destinasi, Kabupaten Tapanuli Utara perlu menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota yang termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional Medan – Toba.

Konsep pengembangan pariwisata Tapanuli Utara dapat dimulai dari identitas "*North Tapanuli, The Spirit Of Toba*". Sejarah membuktikan bahwa sejarah titik balik menuju peradaban maju dan budaya damai di kawasan Danau Toba dimulai dari Tapanuli Utara, yaitu sejak Apostel Nommensen membawa *barita nauli* di wilayah ini. Sekaligus untuk menunjukkan meskipun bahwa keragaman obyek dan atraksi wisata di kawasan Danau Toba terus berkembang tetapi kesemuanya tetap ber-induk dan ber-awal dari Tapanuli Utara, dengan kata lain inti dan orisinalitas kekuatan budaya

masyarakat di Kawasan Danau Toba juga berada dimasyarakat Tapanuli Utara.

Dari sisi aksesibilitas, proses masuknya wisatawan ke Tapanuli Utara dapat dikembangkan melalui konsep yang ditampilkan dalam motto misalnya "*Peaceful and Nice Place to Visit and Enjoy*" dan dari sisi keterpaduan dengan daerah lain di KPPN, KSPN maupun kawasan Destinasi Pariwisata Nasional yang sama, dapat saling mengembangkan kerjasama dalam bentuk pengembangan wilayah perbatasan dan jalur transportasi yang menghubungkan obyek-obyek dan ODTW penting di kawasan, melalui motto misalnya *saroha sauhur*.

Pengembangan pariwisata perlu didasarkan atas karakteristik alami dan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Karakteristik, keunikan dan keindahan alam serta budaya Tapanuli dapat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu di setiap upaya perencanaan perlu mengacu kepada karakter alam dan kesesuaian dengan tradisi budaya yang tercermin dalam bentuk, pola, struktur ruang wilayah yang mengakar pada nilai estetika dan ekspresi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya pengembangan bagian wilayah yang sudah relatif maju perlu dikonsolidasikan, yang belum berkembang perlu dipacu pergerakannya dan yang sedang atau mulai berkembang agar didorong untuk terus maju secara terarah dan terencana serta berkelanjutan. Oleh karena itu pengembangan wilayah terpadu memperhatikan tingkat kemajuan wilayah dan keselarasan dengan pengembangan wilayah yang masih berkembang, sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah.

Konsep pengembangan produk utama pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berorientasi pada proses dan sejarah religius, potensi dan daya tarik keindahan, keunikan dan pesona alam pegunungan serta keunikan dan kekhasan sejarah-budayanya. Orientasi pada suasana religious, potensi keindahan dan pesona

alam serta daya tarik sejarah budaya dapat dikembangkan menjadi tema sentral produk pariwisata, memungkinkan berbagai lapisan masyarakat sebagai stakeholder pariwisata dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata. Demikian pula sebaliknya pariwisata diharapkan dapat mendorong pengembangan budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika budaya tersebut perlu dikaitkan dengan keberagaman dan keindahan pesona alam, sehingga dalam pengembangan pariwisata perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Budaya dan alam saling terkait dan mempengaruhi, sehingga pengembangan produk wisata sedapat mungkin memperhatikan karakteristik masing-masing dan interaksi keduanya.

Produk wisata dikembangkan dengan tema-tema yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kecenderungan perkembangan minat wisatawan, terutama tema-tema minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Paket wisata di kawasan hutan alami memiliki pasar tersendiri khususnya bagi para pecinta petualangan. Tema-tema pariwisata seperti *jungle tracking* dan *wildlife conservation* dapat menarik wisatawan asing tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga diajak untuk turut serta membantu konservasi lingkungan. Tema-tema wisata massal (*mass tourism*) juga potensial untuk dikembangkan, karena mudah dinikmati oleh masyarakat Tapanuli Utara dan masyarakat di daerah kabupaten/kota sekitarnya.

Pengembangan produk pariwisata perlu didukung oleh industri kacil dan menengah yang berbasis pada pemberdayaan perekonomian rakyat. Hal ini penting karena kegiatan wisata diharapkan juga memacu peningkatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu program-program pengembangan

produk wisata seyogyanya melibatkan peran serta usaha kecil (UMKM) dan koperasi serta mengembangkankemitraan dengan usaha menengah dan investor besar pariwisata.

Pengembangan produk wisata perlu memperhatikan standar-standar mutu produk dan pelayanan dasar seperti kebersihan, sanitasi dan higienis, keindahan serta keamanan. Standarisasi pelayanan dengan tarif yang jelas juga perlu dipahami oleh setiap penyedia jasa serta para wisatawan.

Pengembangan produk wisata dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kapasitas masyarakat, kemampuan pemerintah daerah, serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengelola potensi pariwisata menjadi produk-produk yang bermanfaat. Artinya pengembangan produk pariwisata dilakukan tidak dengan cara massal dan dengan perubahan yang drastis tetapi dengan seksama dan bertahap. Prioritas pengembangan dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan yang konkrit yang terencana. Dengan demikian semua pihak akan belajar dari proses keberhasilan atau kegagalan pengembangan suatu produk wisata. Prinsip suatu pengembangan produk wisata salah satunya adalah proses belajar dari pengalaman bersama.

Kegiatan usaha pengembangan wisata diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam mendinamisir perekonomian daerah. Konsep pengembangan pariwisata Tapanuli Utara diarahkan kepada wisata religi, budaya dan keindahan alam dataran tinggi, dimana wisatawan selain dapat menikmati ketenangan batin, keunikan budaya dan keindahan alam juga diharapkan ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan konservasi budaya dan lingkungan sekaligus memperoleh pemahaman lebih tentang seluk beluk ekosistem budaya dan alam pegunungan. Interaksi wisatawan dengan masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran bersikap saling menghormati nilai dan tata cara budaya

masing-masing dan keduanya saling berupaya agar tetap lestari.

Citra pariwisata menjadi penting dalam promosi dan pemasaran. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Citra ini seperti magnet yang tidak terlihat namun memiliki daya tarik sangat kuat, tanpa citra maka destinasi wisata kurang dapat menyerap potensi pasar wisatawan.

Oleh karena itu citra pariwisata harus ditemukan, diolah dan dibangun secara kontinyu. Identitas jati diri yang dibangun di kawasan dataran tinggi atau pegunungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah ketaatan beribadah, adat istiadat dan seni budaya Tapanuli yang bernilai luhur dipadukan dengan garis kehidupan leluhur masyarakat Tapanuli yang religius ditambah perpaduan keindahan dan keagungan alam yang terbentang.

Perpaduan dari kekuatan yang dimiliki tersebut, dicitrakan dalam sebuah *brand image*, slogan maupun symbol yang dapat memberi kekuatan kedalam maupun keluar, dalam arti memberikan kekuatan keluar yaitu masyarakat luas untuk dan ingin mendekat, mengetahui, mempelajari dan mengunjunginya.

Pengembangan pemasaran pariwisata perlu memperhatikan segmen pasar dan karakteristik wisatawan. Kecenderungan yang selama ini telah ada perlu dipelajari dan detekuni dengan upaya promosi secara lebih mendalam, sehingga wisatawan yang pernah datang ingin mengulangi pengalamannya kembali. Sejarah misi dimasa yang lalu nampaknya dapat diolah menjadi bagian dari promosi bagi wisatawan asal Eropa. Sementara itu, diversifikasi produk dan pemasaran perlu juga dilakukan terutama bagi wisatawan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, brunei serta Negara Asia lainnya.

Pemasaran pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara perlu direncanakan secara sistematis dan tematis. Disamping perlu melakukan pemasaran secara terpadu dan

upaya pemasaran dan promosi bukan secara sendiri harus dilakukan sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan tepat.

Investasi memainkan peranan amat penting dalam masyarakat yang sedang membangun. Investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi nasional. Karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan PAD dari retribusi dan pajak daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan investor asing maupun domestik masih enggan untuk segera melakukan investasinya di Kabupaten Tapanuli Utara: Keterbatasan infrastruktur akan mempengaruhi kelancaran dalam berinvestasi karena akan meningkatkan biaya investasi lebih tinggi; birokrasi yang panjang akan menyebabkan biaya tinggi yang disebut *high cost economy*; keterbatasan sumberdana, seringkali pihak perbankan masih sulit meluncurkan dana bagi usaha-usaha kepariwisataan yang biasanya dilakukan oleh pelaku ekonomi kecil yang dianggap mempunyai resiko kredit tinggi.

Beberapa bagian kawasan wisata merupakan kawasan terletak pada topografi yang sulit dijangkau. Beberapa obyek potensial seperti obyek-obyek wisata air terjun dan obyek ekowisata yang umumnya berada pada kawasan yang terjal. Selain itu obyek-obyek tersebut sebagian terdapat pada kawasan lindung yang memerlukan prosedur khusus untuk pemanfaatannya. Beberapa obyek lainnya terletak pada kawasan rawan bencana, seperti kawasan ekowisata, wisata budaya, agrowisata dan geowisata di Kecamatan Muara yang rawan longsor. Secara umum Tapanuli Utara memang dilintasi oleh patahan geologi yang merupakan salah satu sumber gempa bumi. Dengan melihat permasalahan yang ada tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama masyarakat harus berupaya meminimalkan kendala fisik yang terjadi.

Mengacu pada pandangan Gartner (1996), pembentukan kelembagaan pariwisata, khususnya di daerah menjadi penting karena alasan yang dapat disajikan secara singkat sebagai berikut: perlunya keterpaduan semua unsur pariwisata kedalam satuan bersifat holistik. Sistem pariwisata akan berjalan lebih baik jika digerakkan oleh mekanisme kelembagaan yang mencakup semua aktor-aktor palaku pariwisata.

Kemitraan timbul akibat beberapa kelompok sepakat bekerjasama didalam wadah kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama; kalau masyarakat membangun suatu obyek wisata untuk penduduk lokal, maka dengan wadah kelembagaan dapat dibangun suatu identitas wisata daerah. Suku Tapanuli merupakan suku yang memiliki jiwa religius, ciri kultural dan kearifan lokal yang sangat kuat, sehingga potensi ini dapat diangkat sebagai identitas utama dalam utama dalam pembentukan dan operasional kelembagaan; membantu kerjasama; lembaga publik dan swasta (para stakeholders wisata) dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama apabila mereka semua terlibat dalam suatu wadah organisasi.

Oleh karena itu perencanaan kelembagaan harus dimulai dari eksplorasi isu-isu strategis yang mampu menjelaskan masalah apa sesungguhnya yang sedang berkembang di setiap unsur atau elemen sistem pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Atas dasar itu kemudian dilakukan aktivitas untuk mengidentifikasi potensi dan eksistensi masing-masing unsur dan dilanjutkan dengan uraian fungsi-fungsi strategic yang perlu dilakukan.

Untuk Kabupaten Tapanuli Utara yang tergolong sebagai kabupaten yang terus berkembang, maka perencanaan dan pemantapan kelembagaan dalam jangka waktu menengah perlu diutamakan untuk memperkuat peran kelembagaan lokal, termasuk lembaga tradisional atau lembaga adat.

Seringkali ditemukan bahwa para pengelola objek daerah tujuan wisata

(ODTW) yang ada kurang menyadari akan pentingnya pengelolaan lingkungan hutan pegunungan. Padahal, eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya hutan pegunungan, eksploitasi bahan tambang dalam rangka pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang cukup parah. Dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya alam pegunungan secara berlebihan dan tidak terarah telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Proses rusaknya kawasan hutan akibat eksploitasi dan penebangan liar menyebabkan terjadinya longsor di beberapa kawasan. Proses tergerusnya plasma nutfah. Pada dasarnya hal ini merupakan proses yang terjadi secara alami, tetapi kejadian tersebut diperparah oleh ulah manusia yang telah membatat kayu hutan, baik untuk tujuan pemanfaatan nilai ekonomis kayu maupun untuk konversi lahan menjadi perkebunan, permukiman dan tambak atau lokasi bangunan liar. Kerusakan hutan pegunungan mempunyai dampak negatif lebih jauh yang dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri antara lain berkurangnya hasil hutan, semakin sulitnya mendapatkan kayu yang berdiameter besar, sulitnya mendapatkan madu, getah kemenyan, rotan dan sumber air. Selain karena kerusakan hutan pegunungan, pencemaran juga telah banyak memberi andil pada kerusakan lingkungan pegunungan dan perairan, baik limbah cair maupun limbah padat yang bersumber dari industri dan rumah tangga.

Apabila hal ini terjadi pada obyek-obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, maka kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Akibatnya minat wisatawan berkunjung ke ODTW yang rusak lingkungannya akan berkurang. Oleh karenanya sebelum kerusakan lingkungan terlalu parah maka perlu ditangani segera.

Bila dilihat prinsip Sapta Pesona Wisata, terdapat beberapa butir yang berkaitan dengan lingkungan. Kebersihan,

keindahan dan kenyamanan merupakan butir-butir yang berkaitan dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum masalah penting yang harus menjadi landasan bagi setiap rancangan pengembangan di kawasan atau obyek pariwisata adalah menjaga agar tidak melampaui batas daya dukungnya.

Konsep pengembangan lingkungan pegunungan atau dataran tinggi dapat disusun sesuai dengan keadaannya, yaitu kawasan hutan pegunungan, strategi untuk menjaga agar kawasan hutan pegunungan tetap baik kualitas lingkungannya maka dapat ditempuh strategi: 1) Pelestarian Hutan Suaka dan Hutan Lindung, Di wilayah Tapanuli Utara terdapat Kawasan Suaka Dolok Saut, Kawasan Konservasi Sijaba Huta Ginjang, serta Kawasan Lindung Batang Toru. Keberlanjutan obyek-obyek wisata pada kawasan-kawasan tersebut terutama obyek wisata pemandian sungai, wisata air terjun, wisata goa, danau dan wisata edukasi hutan, sangat tergantung pada kondisi dan kualitas hutan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata, pelestarian hutan berbasis masyarakat merupakan strategi yang tidak bisa ditawar lagi. Konsep pengembangannya perlu lebih diarahkan pada pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan langsung dalam pengelolaan lingkungan sehingga mereka merasa memiliki dan pada akhirnya akan muncul kesadaran mereka untuk menjaga dan melestarikan. "Rasa memiliki" inilah yang harus ditumbuhkan di kalangan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Penetapan buffer area, pada kawasan hutan pegunungan di Kabupaten Tapanuli Utara perlu ditentukan dengan jelas trayek batasnya (delineasi). Di kawasan ini tidak boleh dibangun bangunan permanen yang menjadi pusat kegiatan wisatawan. Jika ini dilakukan maka penurunan kualitas lingkungan kawasan akan terjadi. Yang perlu dilakukan oleh pengelola adalah tetap mempertahankan eksistensi batas kawasan

hutan dan pantai dengan berbagai macam jenis tanaman konservasi. 3) Penetapan Baku Mutu untuk Air Sungai dan Danau, air di kawasan hulu sungai dan danau yang akan dipergunakan untuk rekreasi menuntut adanya persyaratan atau ambang baku mutu tertentu.

4) Pengolahan Limbah, wisatawan mempunyai kondisi dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Bagi wisatawan "*eco-travelling*" akan selalu memperhatikan keindahan kawasan. Limbah padat yang dihasilkan wisatawan, harus dikelola dengan baik. Bak sampah setiap hari harus dibersihkan dan kemudian dibuang di TPA terakhir. Sementara limbah cair yang berasal dari perumahan atau dari hotel/pondok wisata/*guest house* serta dari tapak wisata, harus dikelola sendiri limbahnya. 5) Kawasan Permukiman, Menjaga terus menerus agar *building coverage* tidak terlalu tinggi misalnya dengan KLB maksimum 0,8. Apabila ada pembangunan rumah atau perumahan perlu dipersyaratkan kepada mereka untuk membuat semua penyerapan air hujan.

Kawasan Pertanian dan Peternakan Sebagai Kawasan Agrowisata, pada lahan pertanian seperti lahan persawahan di Desa Sitanggor Kecamatan Muara, pengembangan perkebunan rakyat kopi dan *haminjon* di Pangaribuan, ladang nenas di Kecamatan Sipahutar, ladang jeruk di Lobu Hole, ladang salak di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga, perlu terus dipacu pengembangan prinsip agrowisata tanaman pangan dan perkebunan yang membatasi penggunaan pestisida dan pupuk buatan (pabrik) yang berlebihan. Selain itu, untuk peternakan perlu dibarengi dengan pengolahan limbah yang berwawasan lingkungan, selain perlunya pengaturan pagar keliling tapak usaha yang lebih bersifat ramah lingkungan.

Kawasan Peninggalan Sejarah dan Budaya, Kelestarian kawasan dan situs bersejarah (seperti Tapak Gereja Dame, Tapak Salib Kasih, Tugu Nommensen, Pusat HKBP, Situs Hopong, Tangsi

Tarutung, Makam Lyman dan Munson, Onan Stahurung dan sebagainya) termasuk di dalamnya kawasan budaya serta produk seni asli yang tumbuh atau bertahan di kalangan masyarakat dikawasan tersebut seperti Desa Budaya Simatupang, Desa Tradisional Silali Toruan, Desa Tenun Papande, dan sebagainya, perlu dipertahankan dengan segala upaya.

Pada dasarnya kegiatan pengembangan potensi pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara diwujudkan melalui dua bagian, yang pertama adalah pada bagian pengembangan potensi pariwisata itu sendiri, serta bagian pemasaran dan promosi wisata. Masing-masing bagian ini memiliki peranannya tersendiri dalam hal mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Bagian pengembangan wisata memiliki peran dan kewajiban untuk mengakomodir sarana dan prasarana di seluruh obyek wisata dan usaha wisata yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti penyediaan akses menuju obyek wisata, penyediaan toilet, penyediaan loket dan karcis retribusi masuk obyek wisata dan lain sebagainya, sedangkan bagian pemasaran dan promosi wisata secara garis besar berperan dalam rangka mempromosikan obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara kepada wisatawan melalui berbagai program yang telah disusun sebelumnya.

Pengembangan pariwisata, selain dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah juga dapat digunakan sebagai sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan melihat beragamnya potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholder pengembang pariwisata sudah seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana dan Gayatri (2005 : 95), pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai: 1) Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengembangan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dukungan investor, pengusaha wisata serta masyarakat. Investor sebagai pemilik modal dapat menanamkan modalnya di obyek wisata, pengusaha di bidang pariwisata dapat mengembangkan usahanya sekaligus dapat membantu mengembangkan pariwisata di Tapanuli Utara, dan masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perkembangan pariwisata di lingkungan mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Dinas Pariwisata telah melakukan beberapa upaya untuk memotivasi kalangan investor, pengusaha wisata serta masyarakat agar tertarik turut serta mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara melalui program sosialisasi sadar wisata, pelatihan pengelolaan usaha wisata, sampai dengan dukungan dana *stimulant* bagi usaha wisata berbasis masyarakat.

Selama ini, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam memotivasi masyarakat peneliti nilai belum cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata yang masih rendah. Masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pariwisata, meskipun sebagian lagi telah mengerti dan mulai mengembangkan usaha wisata secara swadaya dalam bentuk Desa Wisata.

Melalui program sosialisasi dan promosi wisata, Dinas Pariwisata juga terus mengupayakan kalangan investor dan pengusaha wisata agar tertarik turut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara, namun peneliti melihat upaya tersebut juga masih belum optimal, sehingga investor dan pengusaha wisata selama ini belum tertarik untuk ikut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih sepiunya kegiatan usaha dan Dinas Pariwisata pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Masih minimnya jalinan dengan pihak ketiga tersebut disebabkan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah faktor anggaran yang terbatas, sehingga menjadi terbatas pula peran penyediaan fasilitas oleh Dinas Pariwisata. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan di obyek wisata tersebut lalu turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Tapanuli Utara.

Masih minimnya promosi serta informasi akan potensi ekonomi wisata pada pengusaha wisata juga menghambat pihak ketiga tertarik mengembangkan usahanya. Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata tidak lantas hanya terbatas sebagai motivator seperti dijelaskan diatas, namun, diperlukan juga upaya lanjutan dari Dinas Pariwisata sebagai *stakeholder* pariwisata Tapanuli Utara untuk dapat memfasilitasi para investor dan pengusaha serta masyarakat tersebut.

2) Fasilitator, Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara, peran dari Dinas Pariwisata adalah untuk menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menyediakan sarana prasarana obyek wisata, memfasilitasi pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat seperti Desa Wisata, penyediaan informasi terkait potensi ekonomi wisata pada pihak ketiga sampai

dengan promosi obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada dasarnya, peran Dinas Pariwisata Kabupaten sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata organisasi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara terkandung mengenai tugas dan fungsi pokok organisasi terendah Dinas. Selama ini upaya pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana di obyek wisata, seperti pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pokok pariwisata, sampai dengan pembangunan fasilitas pendukung usaha pariwisata. Selanjutnya, Dinas Pariwisata juga berupaya untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dana pengembangan usaha melalui pengajuan bantuan pada PNPM mandiri, selain itu fasilitas juga diberikan pada investor dan pengusaha wisata dalam bentuk bantuan promosi obyek wisata swasta, sampai dengan pemberian informasi pada pengusaha wisata seperti lokasi lahan potensial usaha wisata, potensi wisata yang belum tergarap dan lain sebagainya.

Khusus untuk penyediaan sarana prasarana obyek wisata, peran Dinas Pariwisata masih sangat dominan, sedangkan pada realitanya sumber anggaran yang dimiliki dinas terbatas, sehingga sarana prasarana di beberapa obyek wisata terlihat masih sangat kurang jumlahnya. Faktor yang paling mempengaruhi adalah masih minimnya partisipasi dari pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata yang secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah sebagai *stakeholder* pengembang wisata untuk memfasilitasi sebagian besar sarana prasarana yang terdapat di Obyek Wisata, akibatnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tersebut seakan akan hanya habis untuk membiayai penyelenggaraan di obyek obyek wisata.

Investor dan pengusaha wisata sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan sudah seharusnya juga memberikan kontribusi yang lebih dalam pengembangan pariwisata, sehingga

pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* wisata tidak kewalahan khususnya dalam pembiayaan pengembangan pariwisata, lebih jauh lagi, pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan pihak lain, sehingga permasalahan tentang keterbatasan sumber daya dapat diatasi.

3) Dinamisator, dalam pilar *Good Governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata di Tapanuli Utara memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sebagai upaya dinamisasi antar *stakeholder* pengembang pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui berbagai kesempatan dialog mengenai perkembangan pariwisata dengan pihak-pihak tersebut.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, kesempatan dialog dengan sektor swasta diselenggarakan saat *event-event* promosi wisata, sedangkan dialog dengan masyarakat dilakukan pada saat sosialisasi dan pelatihan pengelolaan obyek wisata baik yang bersifat rutin maupun insidental, selanjutnya dialog dengan sektor pemerintahan lain seperti Dinas Pekerjaan Umum juga dilakukan dalam upaya peningkatan sarana prasarana obyek wisata.

Upaya untuk mensinergiskan antar *stakeholder* ini peneliti nilai masih dalam taraf normal, namun mengingat kondisi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan suatu inovasi lebih, pemerintah daerah seharusnya perlu meningkatkan perannya ini secara lebih

intens lagi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih banyak obyek wisata di Kabupaten Tapanuli Utara yang pengembangannya masih didominasi oleh peran dari pemerintah, sedangkan peran dari pihak swasta dan masyarakat masih minim.

Upaya pemerintah daerah dalam mensinergikan antar *stakeholder* pengembang pariwisata ini memang tidak mudah, mengingat masih minimnya partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Tapanuli Utara. Melihat hal tersebut, maka peneliti menilai perlu dilakukan suatu konsolidasi rutin dan *massive* antar sektor, yang didalamnya pemerintah daerah bertindak sebagai suatu perantara sehingga diharapkan dapat timbul suatu inovasi lintas sektor yang sinergis.

SIMPULAN

Pengembangan parawisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada beberapa konsep, seperti: Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar mancanegara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumberdaya pariwisata yang ada.

Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut ini

merupakan tiga peran Dinas Kebudayaan Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara: Sebagai Fasilitator, Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana prasarana di obyek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan pihak investor dan pengusaha wisata, memasarkan obyek wisata, memfasilitasi kelompok masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana *stimulant*, dan lain sebagainya. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar investor dan pengusaha wisata di Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, sehingga obyek wisata dapat berkembang dengan baik.

Sebagai Motivator, Dinas Pariwisata sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan pengusaha wisata. Pentingnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara akan pentingnya pariwisata menuntut peran Dinas Pariwisata agar terus memberikan motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana *stimulant*. Motivasi juga perlu untuk terus diberikan kepada para investor dan pengusaha wisata di Kabupaten Tapanuli Utara agar investor dan pengusaha wisata tersebut tertarik mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara tidak langsung juga dapat meringankan beban anggaran dari Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinamisator, Sebagai upaya dinamisasi antar *stakeholder* pengembang pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pariwisata selama

ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui dialog pada saat penyelenggaraan *event* promosi wisata, dialog pada saat sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyedia sarana prasarana umum penunjang kebutuhan pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J. 1998. "Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja", Jakarta: UI Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suwantoro, G. 2004. "Dasar-Dasar Pariwisata", Yogyakarta: Andi
- Sumarto, H. 2003. "Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Heywood, A, 2013. Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Instruksi Presiden Inpres No 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- Syafie, I.K. 2009. "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)", Jakarta : PT Bumi Aksara
- Nazir, M. 2003. "Metode Penelitian", Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Moleong, L.J. 2010. "Metodelogi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja
- Nazir, Moh., 2003. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pendit, N.S. 2003. "Ilmu Pariwisata 'Sebuah Pengantar Perdana'", Jakarta: Pradnya Paramita
- Yoeti, O.A., 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- _____. 2001. "Manajemen Pariwisata", Jakarta: Pradnya Paramita
- Pitana, I.G., dan Putu G.G. 2005. "Sosiologi Pariwisata ". Yogyakarta: Penerbit Andi
- Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Tjiptoherijanto, P. 1993. "Reformasi dan Pembangunan Nasional", Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kaho, J.R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi). Jakarta: Grafindo Persada.
- Sadewo. 1997. "Pembinaan Administrasi Barang Milik atau Kekayaan Negara", Jakarta: CV Panca Indra
- Sedarmayanti. 2004. "Good Governance 'Kepemerintahan Yang Baik' ", Bandung: Mandar Maju
- Sondakh, A. 2010. "Jendela Pariwisata Angelina Sondakh: Perkembangan Pariwisata Indonesia ", Jakarta : Kesaint Blanc
- Siagian, S.P. 1992. "Kerangka Dasar Ilmu Administrasi ", Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. 2003. "Administrasi Pembangunan 'Konsep, Dimensi dan Strateginya' ", Jakarta: PT Bumi Aksara
- Spillane, J.J. 1987. "Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya", Yogyakarta: Kanisius
- Suharsini, A, 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Bina Aksara.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suwarjoko, W & Warpani P. I. 2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. Bandung: ITB
- Syafii, I.K., 2011. Sistem Administrasi Negara. Jakarta
- Lubis, A., (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 191-203
- Cahyadi, B., dan Abdul K., (2015). Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 14-24.
- Kasiatik dan Irwan N., (2013). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (2): 104-116.
- Simamora, A.H., dan Trisni A., (2015). Peranan Organisasi Al Jamiatul Wasliyah Cabang Tanah Karo Tahun 1938-1967. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (2): 127-142.

- Wahab, S. 2003. Manajemen Kepariwisataaan. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wahyudi, K. 1992. "Etika Administrasi Negara", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wiyono, S. 2006. Manajemen Potensi Diri. Jakarta: PT Grasindo
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (5)